

STRATEGI PERCEPATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DENGAN SIKUPIS DI DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA *(ACCELERATED UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) STRATEGY WITH SIPUKIS AT THE SURAKARTA CITY HEALTH OFFICE)*

Rama Perkasa, Aulia Satria Bimantara, Handika Rosalin, Afifah Faza

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pascasarjana, Universitas Jember

Corresponding author:

name and affiliation: Rama Perkasa, Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pascasarjana, Universitas Jember

E-mail: ramaapoteker@gmail.com

Abstract

Objectives: *The purpose of this article is to find out the strategy of acceleration of universal health coverage (UHC) with SIPUKIS in the health Department of Surakarta city.*

Methods: *The research method used was descriptive qualitative with primary data collection through observation and interviews with the Head of the Health Services Division, as well as using secondary data from research journals and the Health Service website.*

Results: *The research results show a significant increase in JKN coverage in Surakarta, as well as the adoption of SIPUKIS as an effort to increase transparency and efficiency in applying for the Healthy Indonesia Card. The SIPUKIS business process and application flow are documented in detail, including the planning, strategy, implementation, monitoring and goal achievement stages. The benefits of SIPUKIS include providing better information accessibility to the public, speeding up the service process, and increasing satisfaction and trust in the health system..*

Conclusions: *In conclusion, SIPUKIS has brought significant positive changes to the health service system in Surakarta. This implementation resulted in improvements in transparency, efficiency and public satisfaction with health services. Thus, SIPUKIS is a progressive step in realizing the UHC vision and improving the overall welfare of society in Surakarta Regency. This effort reflects the government's commitment to providing equitable and quality access to health for the entire population, as well as being an example for other regions in implementing innovative solutions in the health sector.*

Keywords: *UHC Acceleration Strategy, SIPUKIS*

Received: Feb 14, 2024 Revised: March 3, 2024 Accepted: Apr 5, 2024

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Kemasindo Publisher

INTRODUCTION

Kesejahteraan fisik merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan individu. Ketika tubuh dalam kondisi optimal, individu dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik sepanjang hidupnya [1]. Menurut definisi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesejahteraan mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal, bukan sekadar ketiadaan masalah kesehatan atau kekurangan [2]. Kesejahteraan ini adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang karena memungkinkan mereka untuk berfungsi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan.

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat melibatkan serangkaian tindakan terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Ini meliputi pencegahan penyakit, peningkatan kesejahteraan, pengobatan, dan pemulihan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat [3]. Menurut undang-undang tersebut, kesehatan melibatkan lima dimensi, yaitu fisik, mental, sosial, spiritual, dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa evaluasi kesehatan tidak hanya berdasarkan aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga bersifat holistik atau menyeluruh. Kesehatan seseorang juga berdampak pada produktivitasnya, terutama dalam konteks ekonomi. Semua dimensi tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan [4].

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk di Kota Surakarta. Konsep ini menjamin bahwa setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik dalam hal promosi, pencegahan, pengobatan, maupun rehabilitasi, dengan biaya yang terjangkau. Kota Surakarta, dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan mobilitas yang intens, menghadapi tantangan serius dalam menjaga kesehatan publik. Dalam konteks mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Di Kota Surakarta, JKN mencapai sekitar 81,04%, dan pemerintah menargetkan angka tersebut mencapai 98% pada tahun 2024.

Dalam rangka percepatan UHC, Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki inovasi dengan menggunakan Sipukis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai strategi percepatan UHC di dinas kesehatan Kota Surakarta sangatlah penting. Program Studi S2

Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Jember juga turut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan masyarakat dengan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan etika profesi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu implementasi dari pendidikan tersebut adalah melalui kegiatan kunjungan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat.

METHODS

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan proses pengamatan paparan materi dan melakukan tanya jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kegiatan penelitian ini berlangsung dari tanggal 18-22 Februari 2024. Pada hari Senin, 19 Februari 2024, pengambilan data dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang berlokasi di Komp. Balai Kota, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57133.

- a. Peneliti melakukan pengamatan dan pendokumentasian saat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sedang mempresentasikan materi.
- b. Setelah kepala bidang pelayanan kesehatan melaksanakan presentasi, selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil paparan kepala bidang pelayanan kesehatan, dan data sekunder didapatkan dari Jurnal Penelitian dan Website Profil Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
- c. Setelah semua data telah didapatkan, data tersebut dikelola dan dianalisis oleh peneliti.

RESULTS AND DISCUSSION

a. Gambaran Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Surakarta

Cakupan jaminan kesehatan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai 96,73 persen. Cakupan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok jenis kepesertaan yaitu: 1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 49,35 persen terdiri dari PBI APBN sebesar 30,71 persen dan PBI APBD sebesar 18,64 persen; 2) Non PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran) sebesar 47,38 persen terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU)

sebesar 30,46 persen, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU)/ mandiri sebesar 13,83 persen dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 3,09 persen.

Tren cakupan kepesertaan JKN di Kota Surakarta dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terjadi penurunan kepesertaan JKN dari 543.959 peserta pada tahun 2019 menjadi 537.868 peserta. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, perubahan demografis, atau faktor ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa penurunan ini relatif kecil dan tidak signifikan.



Gambar 1.1 Kepesertaan JKN Surakarta

Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan JKN kembali mengalami peningkatan menjadi 547.566 peserta, yang menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Pada tahun 2022, tren peningkatan tersebut terus berlanjut, dengan cakupan kepesertaan JKN mencapai 559.561 peserta. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Peningkatan ini, menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat Kota Surakarta yang dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih terjangkau dan merata. Peningkatan kepesertaan JKN juga akan membantu dalam mencapai tujuan UHC, dimana semua orang dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.

b. Strategi Percepatan UHC melalui SIPUKIS di Dinas Kesehatan Surakarta

Perkembangan positif dalam cakupan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Surakarta membawa tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan setempat. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya jumlah berkas pengajuan KIS yang masuk. Fenomena ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Namun, peningkatan jumlah berkas ini juga menyebabkan penumpukan pada waktu-waktu mendekati *deadline* pengiriman ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan [5]. Keterbatasan waktu dalam melakukan verifikasi dan *entry* data juga menjadi hambatan dalam memproses berkas pengajuan KIS dengan cepat dan akurat. Banyaknya masyarakat yang menanyakan kemajuan pengajuan KIS mereka, menunjukkan adanya kebutuhan akan komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antara Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Dinas Kesehatan Kota Surakarta perlu mengembangkan Strategi Percepatan UHC melalui Sistem Informasi Pengajuan Kartu Indonesia Sehat (SIPUKIS). Strategi ini harus mencakup peningkatan kapasitas dalam mengelola administrasi, optimalisasi proses verifikasi dan *entry* data, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat. Diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih efisien dan responsif dalam menangani pengajuan KIS, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan cepat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

c. SIPUKIS (Sistem Informasi Pengusulan Kartu Indonesia Sehat)

SIPUKIS merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pengajuan KIS dan memberikan informasi yang jelas mengenai kemajuan pengusulan KIS bagi peserta PBI APBD. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengajukan KIS secara *online* tanpa harus menghadiri kantor fisik, sehingga meminimalkan waktu dan biaya yang diperlukan. SIPUKIS juga memberikan fitur pelacakan (*tracking*) yang memungkinkan peserta untuk melacak kemajuan pengusulan mereka sebagai bentuk transparansi pelayanan dan memberikan keyakinan kepada peserta PBI APBD akan kelancaran pengajuan KIS masyarakat.

d. Tujuan SIPUKIS

Tujuan utama dari SIPUKIS adalah untuk mendukung strategi percepatan UHC di Kota Surakarta. Melalui SIPUKIS diharapkan proses pengajuan Kartu KIS dapat lebih efisien dan efektif, memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan akses yang cepat dan mudah terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya dengan mengurangi birokrasi yang memakan waktu dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menyelenggarakan program-program kesehatan yang lebih inklusif. SIPUKIS juga bertujuan untuk memberikan pelayanan

yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat Kota Surakarta. Pemohon dapat mengajukan JKN KIS tanpa harus menghadiri kantor secara langsung, menghemat waktu dan tenaga. Proses pengajuan yang lebih cepat dan mudah diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pemohon dan memperkuat kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Fitur pelacakan perkembangan pengajuan KIS memberikan kemudahan bagi pemohon dalam memantau kemajuan pengajuan KIS-nya. Hal ini memberikan rasa aman dan keyakinan kepada pemohon serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tepat waktu kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta.

e. Manfaat SIPUKIS

Manfaat pertama, dengan SIPUKIS, masyarakat dapat langsung mengetahui dan melengkapi berkas usulan pengajuan yang belum lengkap ke kelurahan untuk dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini memungkinkan pemohon untuk melakukan koreksi atau penambahan data secara cepat dan efisien, sehingga meminimalkan kemungkinan penolakan pengajuan akibat kelengkapan berkas yang tidak memadai. Manfaat kedua, memudahkan masyarakat dalam melacak hasil pengusulan KIS dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal lahir melalui aplikasi SIPUKIS. Masyarakat dapat melihat secara langsung status pengajuannya, termasuk apakah pengajuan mereka sudah diproses atau masih dalam tahap verifikasi. Ketiga, aplikasi SIPUKIS juga memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan informasi mengenai status kepesertaan KIS, masyarakat dapat memeriksa apakah mereka sudah terdaftar sebagai peserta KIS atau belum.

f. Proses Bisnis/ Milestone SIPUKIS



Gambar 1.2 Proses Bisnis/Milestone SIPUKIS

Proses bisnis SIPUKIS dimulai dari tahapan pertama, yang berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus 2022, yakni tahap perencanaan yang membutuhkan koordinasi internal di antara berbagai

unit dalam dinas tersebut. Pada periode ini, upaya dilakukan untuk merumuskan konsep aplikasi SIPUKIS serta menetapkan anggaran yang diperlukan dari APBD untuk mendukung pengembangannya. Konsep aplikasi juga dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Pada bulan September 2022, dilakukan tahap strategi yang mencakup dukungan dari pimpinan dinas serta stakeholder terkait. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa implementasi SIPUKIS dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak terkait. Langkah-langkah strategis ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Pada bulan Oktober 2022, masuk tahap *action*, di mana rencana yang telah dirumuskan mulai diimplementasikan secara nyata.

Unit lintas sektor bertanggung jawab atas dukungan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan SIPUKIS. Petugas sosialisasi juga diberikan bimbingan teknis untuk memastikan mereka terampil dalam mengoperasikan aplikasi ini. Tahap uji coba pelaksanaan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan penyesuaian sebelum implementasi penuh. Proses berlanjut ke tahap *monitoring*, yang berlangsung dari November hingga Desember 2022. Pada periode ini, dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang SIPUKIS serta dilakukan pemantauan terhadap sistem dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan data secara berkala juga menjadi fokus utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini. Terakhir, tahap *goal* berlangsung dari Januari hingga November 2023, dengan ditetapkannya target untuk mencapai UHC minimal 98% serta kelancaran *tracking* KIS APBD. Monitoring terus dilakukan untuk memastikan bahwa target-target ini tercapai dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kota Surakarta. Tahapan ini menggarisbawahi komitmen penuh Dinas Kesehatan Surakarta dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya.

g. Proses Bisnis/ Milestone SIPUKIS



Gambar 1.3 Alur Pengajuan SIPUKIS

Alur pengajuan SIPUKIS memiliki dua kondisi yaitu Pertama, dalam kondisi tidak gawat darurat, proses dimulai dengan pemohon yang melengkapi

persyaratan yang diperlukan. Pemohon kemudian harus mengunjungi kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan input data di aplikasi SIPUKIS. Berkas kemudian masuk ke Dinas Kesehatan, dilakukan pengecekan kelengkapan dan diagenda, serta memberikan tanda terima. Pada tahap ini, proses validasi dan verifikasi juga dilakukan pada aplikasi SIPUKIS. Data kemudian dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta ke BPJS. Setelah proses di BPJS selesai, umpan balik akan dikirim kembali ke dinas kesehatan dan diaplikasikan pada SIPUKIS. Selama proses ini pemohon dapat melacak status permohonannya melalui aplikasi SIPUKIS. Setelah selesai, data dapat diekspor untuk mencetak surat keterangan terdaftar JKN KIS APBD.

Pada kondisi darurat, alur pengajuan sedikit berbeda. Pemohon masih harus melengkapi persyaratan, namun berkas pemohon langsung masuk ke Dinas Kesehatan tanpa perlu melalui kelurahan. Berkas diperiksa untuk kelengkapan dan diagenda, serta diberi tanda terima seperti dalam kondisi sebelumnya. Proses validasi dan verifikasi pada aplikasi SIPUKIS juga tetap dilakukan. Data kemudian dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta ke BPJS dengan penekanan pada pengiriman setiap hari kerja untuk mengatasi situasi darurat. Setelah proses di BPJS selesai, umpan balik akan dikirim kembali ke dinas kesehatan dan diaplikasikan pada SIPUKIS, dan pemohon dapat terus melacak status permohonannya melalui aplikasi tersebut. Sebagaimana sebelumnya, setelah selesai, data dapat diekspor untuk mencetak surat keterangan terdaftar JKN KIS APBD. Baik dalam kondisi darurat maupun tidak, alur pengajuan SIPUKIS memastikan proses yang terorganisir dan transparan bagi masyarakat serta pihak terkait.

h. Hasil Implementasi SIPUKIS

No	SEBELUM	SESUDAH
1	Belum adanya system yang menyediakan informasi progress kepada masyarakat sebagai pengusul / pengajuan Kartu Indonesia Sehat yang belum maksimal	Adanya sistem / aplikasi yang menyediakan informasi progress kepada masyarakat sebagai pengusul / pengajuan Kartu Indonesia Sehat
2	Masyarakat banyak yang datang ke Dinas Kesehatan bertanya progress pengajuan KISnya	Masyarakat dapat mengakses melalui android informasi progress pengajuan KISnya
3	Tidak adanya bukti tertulis yang memberitahukan jika pengusulan KIS sudah selesai / sudah jadi	Ada bukti tertulis (surat keterangan) yang dapat didownload mencantumkan identitas dan nomor KIS warga

Gambar 1.4 Hasil Implementasi SIPUKIS

Sebelum diterapkannya SIPUKIS, masyarakat menghadapi serangkaian kendala yang mempersulit mereka untuk memperoleh informasi terkait status pengajuan KIS. Tidak tersedia sistem yang

menyediakan informasi secara terperinci tentang perkembangan pengajuan KIS kepada masyarakat. Keterbatasan ini mengurangi transparansi dalam proses pengajuan KIS dan membuat masyarakat merasa tidak yakin terhadap kelancaran prosesnya. Banyak masyarakat yang terpaksa mengunjungi Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk menanyakan perkembangan pengajuan KIS yang membebani petugas dan memperlambat proses pelayanan. Tidak adanya bukti tertulis yang memberitahukan apakah pengajuan KIS sudah selesai atau masih dalam proses juga menjadi masalah serius, karena hal ini menciptakan ketidakpastian dan kesulitan bagi masyarakat untuk memastikan status KIS mereka. Penerapan SIPUKIS, membawa perubahan signifikan dalam aksesibilitas informasi bagi masyarakat terkait pengajuan KIS. SIPUKIS memberikan solusi dengan menyediakan akses kepada masyarakat untuk melacak progress pengajuan KIS melalui sistem dan aplikasi yang tersedia.

Masyarakat kini dapat dengan mudah memantau tahapan proses pengajuan KIS secara langsung melalui perangkat *android* atau perangkat lain yang terhubung dengan internet. Masyarakat menjadi mudah dalam memperoleh informasi, mengurangi beban kerja petugas dan mempercepat proses pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. SIPUKIS juga menyediakan bukti tertulis berupa surat keterangan yang dapat diunduh oleh masyarakat setelah pengajuan KIS selesai diproses. Hal ini meningkatkan transparansi dalam sistem dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status pengajuan KIS. Implementasi SIPUKIS membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengajuan KIS. Proses pengajuan KIS menjadi lebih transparan, cepat, efisien, serta memberikan kepastian, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional secara keseluruhan.

CONCLUSION

Secara keseluruhan, implementasi Strategi Percepatan Universal Health Coverage (UHC) melalui Sistem Informasi Pengajuan Kartu Indonesia Sehat (SIPUKIS) telah membawa perubahan positif yang signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan di Surakarta. Transparansi, efisiensi, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Surakarta telah berhasil

dalam menyediakan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk.

REFERENCES

- [1] Swarjana, I.K.D., Sukartini, T. and Makhfudli, M. Level of attitude, medication adherence, and quality of life among patients with tuberculosis. *International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS)*. 2019; 2(4), pp.334-339.
- [2] Pedhu, Y. Kesejahteraan psikologis dalam hidup membiara. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 10(1). 2022; pp.65- 78.
- [3] Departemen Kesehatan RI. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Depkes RI; 2009.
- [4] Agustina, R. and Handayani, S. HHC RSPP Patient Satisfaction and the Impact of Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, and Responsiveness. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. 2023; 2(2), pp.799-810.
- [5] Departemen Kesehatan RI. UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.